

BAB II

TINJUAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sebelum menguraikan pengertian tentang sistem pengendalian internal terlebih dahulu dikemukakan pengertian sistem. Menurut Surupati (2012;3) bahwa sistem adalah himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang teorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung sama lain dan terpadu.

Menurut Merimin (2011;1) sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Mulyadi (2016;4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari berbagai definisi tentang sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur atau elemen yang memiliki fungsi sendiri-sendiri tetapi mempunyai hubungan yang saling bergantung antara satu dengan yang lain dalam suatu kerangka sistem yang utuh.

Pengendalian merupakan prosedur-prosedur mekanis yang digunakan untuk memeriksa ketelitian data dari administrasi, proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya untuk meyakinkan beberapa pencapaiannya agar sistem itu dapat membantu

manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan yang ada dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2017:180) Pengendalian Internal ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisari, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian.

Menurut Wahyudi (2018) “ Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh oleh dewan komisaris ,manajemen,dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Harnanto dalam Nugroho (2009) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu tipe pengawasan yang dirancang dengan diintegrasikan ke dalam sistem pembagian atau pendelegasian tugas,tanggungjawab wewenang dalam organisasi perusahaan yang bertujuan untuk :

1. Mengamankan aktiva perusahaan
2. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi
4. Mendorong agar kebijakan manajemen .dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (mulyadi 2017;129)

Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan pada tujuan yang dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut data dibagi menjadi dua macam :

1. Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian internal dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dengan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan dalam perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya
2. Pengendalian internal administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong resistensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal akan lebih efektif bila semua pegawai dalam setiap tingkat organisasi menerapkan sasaran dan tujuan organisasi oleh karena itu dalam penerapannya, manajemen suatu perusahaan harus berusaha untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan dari aktivitas yang disetujui dan memadai benar-benar diambil dan dilaksanakan.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010;163) Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah :

1. Menjaga kekayaan Perusahaan

kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan suatu pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak disengaja.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi dapat mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya keijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur.pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan

2.1.3 Unsur-unsur Sistem pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* (2013 ; 3) dibagi menjadi 5 unsur-unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai-nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Unsur ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang

mungkin membuat karyawan melakukan tindakan penyimpangan. Serta meliputi pengkomunikasian nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada karyawan meliputi pernyataan kebijakan, kode perilaku dan teladan.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diberlakukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

c. Gaya manajemen dan gaya operasi

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian interna. Filosofi dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas. Karakteristik ini meliputi : pendekatan pimpinan perusahaan untuk mencapai anggaran laba dan sasaran operasi lainnya serta pelaporan keuangan.

d. Struktur organisasi yang memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab yang baik

Struktur organisasi entitas menentukan garis-garis tanggungjawab dan kewenangan yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengelolaan dan

unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab merupakan proses pendelegasian tugas serta wewenang dari atasan kepada orang yang dipercaya yang mampu untuk melaksanakannya.

2. Penilaian Resiko

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut.

3. Kegiatan pengendalian

Membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tugas organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

- a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pengendalian fisik atas aset
- d. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja
- e. Pemisahan fungsi
- f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- h. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatanya.

- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Mulyadi (2013;164) Untuk menciptakan suatu sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab yang penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Pemisahan fungsi

diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

2. Sistem wewenang dari prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh karena itu didalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang suatu prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pentingnya perusahaan memiliki pegawai yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Tingkat

kecakapan pegawai mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal . apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat. Prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan karyawan tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta,bisa diharapkan bahwa sistem pengendalian internal juga tidak akan berhasil dengan baik.

2.2 Piutang

2.2.1 Pengertian Piutang

Menurut Mulyadi (2014:87) piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun,atau dalam satu siklus kegiatan suatu perusahaan. Menurut Manurung dan Maria (2011:67) piutang adalah jumlah tagihan dari perusahaan terhadap pelanggan berdasarkan penjualan kredit sebelumnya.

Wereen (2014: 404) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang meliputi semua klaim dalam bentuk unag terhadap pihak lainnya,termaksud individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Piutang tersebut dapat diterima dalam jangka waktu tertentu atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan.

Menurut IAI (2012) menjelaskan bahwa piutang meruakan suatu tuntutan kepada pihak yang terkait yang dimana penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama periode perusahaan berjalan. Menurut keiso (2012) mengartikan bahwa piutang merupakan jumlah

terutang oleh pelanggan yang dihasilkan dari proses penjualan barang maupun jasa secara kredit.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang usaha pada umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktivitas normal perusahaan atau entitas, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha bisa diperkuat dengan janji pembayaran tertulis secara formal dan diklasifikasikan sebagai tagih.

2.2.2 Klasifikasi Piutang

Menurut Rudianto (2011: 225) piutang dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Piutang usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun.
2. Piutang bukan usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan angkutan untuk barang rusak atau hilang dan klaim terhadap karyawan.

Piutang dapat terjadi dari berbagai macam kegiatan pemberian pinjaman kepada pegawai, pemberian pinjaman kepada perusahaan lain, penyerahan saham perusahaan kepada pemegang saham. Tetapi pada umumnya piutang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit.

menurut Arry, (2017 ; 203) piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi :

1. Piutang usaha (*Account Receivable*) Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit.
2. Piutang wesel (*Notes Receivable*) Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan baik melalui pinjaman barang atau jasa secara kredit maupun peminjaman sejumlah uang. Tagihan yang disertai janji tulis disebut wesel (Rudianto 2018;98).
3. Piutang lain-lain mencakup semua tagihan yang bukan piutang usaha. Piutang lain-lain ini diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya piutang bunga, piutang deviden, piutang pajak, tagihan kepada karyawan.

Jenis/klasifikasi lain dari piutang yaitu berdasarkan jangka waktu pelunasan dari piutang atau berdasarkan sifat dari piutang tersebut. Keiso D.(2018) mengklasifikasikan piutang berdasarkan sifatnya melalui 2 cara yaitu:

1. Piutang lancar (*shot term receivables*) atau piutang jangka pendek adalah piutang yang bersifat lancar yaitu piutang yang pelunasannya tidak lebih dari satu tahun, sehingga piutang ini dikelompokkan dalam aktiva lancar.
2. Piutang tidak lancar (*long term receivables*) atau piutang jangka panjang adalah piutang yang sifatnya tidak lancar, yaitu piutang

yang pelunasanya lebih dari kegiatan normal suatu perusahaan yaitu lebih dari satu tahun.oleh karena itu piutang ini dikelompokan dalam aktiva lain atau aktiva tidak lancar.

2.2.3 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan yang efektif harus ditetapkan guna memastikan penagihan yang tepat atau piutang untuik meminimalisir kerugian dari piutang tak tertagih. Debitur dapat membayar piutang melalui beberapa cara yakni :

1. Membayar langsung
2. Membayar lewat bank
3. Membayar lewat penagihan (petugas atau kreditur)

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “ Sistem Akuntansi” (2013 :493) adalah sebagai berikut :

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan
2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.
3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan kepada debitur
4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.
 - a. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting kedalam kartu

piutang

- b. Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
5. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur.
6. Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur.

Dalam hal penagihan manajemen harus tegas tetapi tidak boleh menimbulkan ketidaknyamanan melainkan kepercayaan yang harus dibangun agar staf penagihan dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Karena debitur lebih cenderung terlambat dalam melunasi hutangnya sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan biasanya perusahaan tidak dapat menagih piutangnya.

2.3 Sistem pengendalian Internal dalam Piutang

Weren, dkk (2005 : 392) prinsip-prinsip pengendalian internal dapat digunakan untuk membentuk pengendalian dalam rangka melindungi piutang. Individu yang bertanggungjawab menangani penjualan harus dipisahkan dari individu yang menangani akuntansi untuk piutang dan persetujuan kredit bertindak sebagai pemeriksa independen atas fungsi penjualan. Karyawan yang menangani akuntansi untuk piutang tidak boleh terlibat dalam penagihan piutang. Pemisahan fungsi-fungsi ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana.

Pada prinsipnya sistem pengendalian internal harus meminimalkan dan mendeteksi serta dapat memperbaiki kesalahan ketika terjadi. pelaksanaan sistem pengendalian internal atas piutang harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi telah dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan. pengendalian internal terhadap piutang dimulai dari penerimaan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini retur penjualan secara periodik harus dibuat perincian piutang dengan golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkasi telah bekerja dengan efisien (Nopiawati & Hati 2018).

Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume penjualan maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan atas transaksi tersebut. Namun ada beberapa resiko atas adanya piutang yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian internal atas piutang . untuk mengendalikan piutangnya, maka perusahaan harus menetapkan kebijakan kreditnya. Yang selanjutnya kebijakan ini berfungsi sebagai standar apabila kemudian dalam pelaksanaan penjualan kredit atau pengumpulan yang tidak sesuai dengan standar, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan.

Menurut Surupati (2013) Prinsip-prinsip pengendalian piutang yang baik adalah sebagai berikut :

1. Pemisahan fungsi dan tugas
2. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan yang berwenang.
3. Menggunakan buku tambahan Piutang yang berfungsi sebagai rincian buku piutang.
4. Mengirim surat pernyataan piutang pada debitur paling tidak sebulan sekali.
5. Membuat daftar umur piutang.

Prinsip-prinsip pengendalian internal dapat digunakan untuk membentuk pengendalian internal dalam rangka melindungi piutang misalnya fungsi persetujuan kredit, fungsi penjualan, fungsi akuntansi dan fungsi penagihan harus dipisahkan oleh fungsi-fungsi tersebut, diasumsikan bahwa penagihan piutang memiliki akses terhadap penerimaan kas dari pelanggan dan kemudian mengubah laporan bulanan pelanggan pelanggan untuk mengindikasikan bahwa pembayaran telah diterima oleh karena itu perlu diciptakan suatu sistem pengendalian internal yang cukup ketat terhadap penagihan piutang.

Menurut Ruchyat dan Kosasi (2015; 404) agar pengendalian internal atas piutang tersebut memuaskan maka harus terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pembukuan.
2. Pembukuan penjualan harus dipisahkan dari penerimaan kas sebagai hasil penagihan piutang.

3. Retur, potongan harga dan penghapusan piutang sangsi, harus disetujui dengan tepat dan dipisahkan dari fungsi penerimaan uang.
4. Pejabat yang berwenang memutuskan penjualan kredit harus terpisah dengan bagian penjualan.
5. Rekening Koran harus dikirimkan kepada debitur setiap akhir bulan oleh petugas yang bukan pemegang buku piutang dan bukan petugas pembuat faktur.
6. Petugas yang menyelenggarakan buku tambahan piutang tidak boleh turut campur dalam penerimaan kas, pembukuan pada kartu piutang harus langsung dari buktinya.
7. Semua kartu piutang harus diverifikasi secara periodik oleh petugas independen, sebaiknya oleh pemeriksa interen. Saldo piutang harus dikonfirmasi langsung kepada debitur.
8. Perusahaan harus membuat daftar analisa umur piutang secara periode.
9. Faktur penjualan, order penjualan dan nota kredit harus bernomor tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengendalian internal terhadap piutang usaha sebagai tindakan preventif atas keselamatan piutang usaha dari adanya kemungkinan piutang tak tertagih. Keterlambatan penagihan dan penyalahgunaan piutang oleh karyawan. Dalam pendekatan preventif manajemen terdapat 3 bidang pengendalian umum yang berhubungan dengan pengendalian piutang yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian kebijakan kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan dan menghambat para pelanggan yang baik dan potensial.

2. Penagihan

Apabila telah diberikan kredit, perusahaan harus berusaha memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar.

3. Penetapan serta pelaksanaan pengendalian internal yang wajar.

Meskipun prosedur pemberian kredit dan pembagian telah diadministrasikan dengan baik atau dilakukan secara wajar, ini tidak menjamin adanya pengendalian piutang yaitu tidak menjamin atau dapat memastikan bahwa semua penyerahan piutang di faktur sebagaimana mestinya kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening bank perusahaan. Itu harus ditetapkan suatu sistem pengendalian internal yang memadai.

Besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada umumnya juga dipengaruhi kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kondisi perekonomian pada umumnya tidak dapat dikendalikan oleh manajer, sedangkan kebijakan pengkreditan sifatnya relative dapat dikendalikan oleh manajer.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis sisitem Pengendalian Internal Piutang pada Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Belu memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian
Nabila Habibi (2013)	Analisis pengendalian piutang pada perusahaan PT Adira Finance Cabang Manado	Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis deskriptif kualitatif	Pengendalian internal piutang usaha PT Adira Finance Cabang Manado sudah cukup efektif manjemen terhadap pengendalian piutang usaha baik dari segi pengolahan hingga pengawasan piutang dilakukan secara baik , penilaian terhadap sistem pengendalian intern piutang usaha dilakukan dengan model kerangka kerja COSO.
Tiara Apriyanti (2013)	Analisis sistem pengendalian internal penjualan dalam menilai kebijakan penjualan kredit pada PD. LESTARI LAHAT	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	PD. LESTARI LAHAT masih terdapat kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal pada prosedur penjualan kredit yang diakibatkan tidak adanya pemisahan fungsi pada fungsi penjualan dengan fungsi kredit dengan fngsi keuangan merangkap tugas sebagai fungsi akauntansi. Sehingga menimbulkan kesalahan evaluasi pencatatan penjualan kredit yang merugikan perusahaan.

Disa Hairunisa Saragih (2014)	Analisis sistem pengendalian intern piutang usaha pad PT SFI Medan	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Masih ditemui adanya perangkapan dimana bagian keuanagn menangani dua fungsi yaitu fungsi penjualan dan fungsi kredit sehingga mempengaruhi ketelitian dan kecermatan dalam seleksi pemberian kredit
Sri Rahayu Utami (2016)	Analisis penerapan sistem pengendalian intern piutang pada perum pegadaian cabang oepura kupang.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	penerapan sistem pengendalian intern terhadap piutang pada perum pegadaian cabang oepura kupang belum dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan penagihan piutang belum melakukan perhitungan piutang tak tertagih sehingga jumlah piutang yang tidak dapat ditagih akan Nampak dalam saldo piutang tahun berikutnya.
Hartina Apriyanti Bangsawan (2019)	Analisis pengendalian intern terhadap piutang pada PT Bumi Karsa	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT bumi karsa sudah efektif baik dari sisi prosedur maupun penerimaannya. Kinerja yang telah sesuai dengan SOP juga memperhatikan lima konsep pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan membuat piutang PT. Bumi Karsa bersifat likuid dan di tahun 2018 piutang sepenuhnya dapat tertagih
Efriliana Naibaho, Supitriyan,	Pengendalian intern piutang untuk meminimalkan	metode penelitian yang	Penerapan pengendalian intern piutang untuk meminimalkan piutang tak

Sepbeariska Manurung, Nelly Ervina (2019)	piutang tak tertagih KP-RI JAYA DINAS P DAN K KABUPATEN SIMALUNGUN	digunakan adalah kualitatif deskriptif	tertagih belum berjalan efektif dimana penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak koperasi hanya menggunakan dua kebijakan yaitu melalui telepon dan kunjungan personal, faktor intern dan faktor ekstern juga menyebabkan adanya piutang tak tertagih.
Elvina Damayanti, Rahmat Daim Harahap (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Piutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta SilaupiasaKabupaten Asahan	Metode yang digunakan adalah kualitatif desriptif	Penagihan piutang yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara belum efektif, hal ini terbukti dengan perputaran piutang yag terjadi tahun pada tahun 2018-2021 mencapai titik terendah . Rata-rata piutang dari tahun 2018 hingga tahun 2021 meningkat dari tahun ke tahun. rata-rata piutang pada PDAM pun tetap mengalami peningkatan yang Menandakan bahwa piutang dari tahun 2018 hingga 2020 terus meningkat. Diperlukannya pengendalian intern yang efektif dengan menerapkan prinsip dasar Pengendalian Intern, diantaranya Tanggung Jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat, metode pengolahan data. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat rekening air pada PDAM
Hanifah (2022)	Analisis sistem pengendalian Internal Atas piutang usaha	Metode yang digunakan adalah	Piutang usaha yang terjadi di PDAM setiap tahunnya mengalami peningkatan

	PDAM Tirta raja Oku	kualitatif deskriptif	karena ada beberapa kebijakan terkait dengan penagihan piutang yang belum optimal serta unsur terhadap sistem pengendalian internal yang belum Efektif.
Ni luh putu pradnya dewi,nil uh putu sri purnama pradnyani (2022)	Analisis pengendalian internal piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada Pandawa Ali Suites Hotel Umalas .	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Pengendalian internal atas piutang yang dilakukan oleh perusahaan kurang optimal hal itu dapat dilihat dari presentase penagihan atas piutang di pandawa suites hotelmasih tergolong rendah karena masih dibawah 50% hal ini ini disebabkan karena masih adanya agen yang belum bisa melunasi tagihannya karena perusahaan tersebut terdampak covid-19.
Adrin Nuradha Diana (2022)	Analisis sistem pengendalian internal piutang pada KPRI KOKARDAN	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan yaitu jika dilihat dari komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal piutang berjalan dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya prosedur awal tahap pemberian pinjaman dengan mengajukan formulir permohonan pinjaman di bagian kartu. Penilaian sistem internal pengendalian internal piutang kurang efektif meskipun ada yang telah dilakukan namun SPI belum optimal.

2.5 Kerangka Berpikir

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Belu melakukan penjualan air secara kredit dalam hal ini menyebabkan adanya piutang usaha. Adanya piutang usaha memerlukan penanganan yang khusus agar terhindar dari resiko tidak tertagihnya piutang akibat kebijakan penjualan kredit tersebut. Oleh karena itu kecermatan pengelolaan penjualan secara kredit ini harus dimulai dari penanganan calon pelanggan yang diperkenankan melakukan pemberian secara kredit, perlu dibuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pelanggan apabila ia tidak memenuhi kewajiban dalam melunasi hutangnya terhadap perusahaan.

Semua itu dilakukan dalam kaitannya upaya pengendalian piutang usaha yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengukur sejauh mana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu melakukan sistem pengendalian internal piutang. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal dirancang dalam piutang dengan merincikan unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap unsur lingkungan pengendalian yang dimaksud agar piutang usaha dapat diawasi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

